

# EFEKTIVITAS INSTRUMEN HUKUM DALAM *ELECTRICITY DIRECTIVE* 72/2009/EC

**Piter Zunimik Sinaga**

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

piter.zunimik@atmajaya.ac.id

## **Abstract**

*In order to achieve effective competition needs several instruments that are expected to facilitate the achievement of these goals. Electricity Directive<sup>1</sup> provides a new system and some renewal of existing systems. The application of such instruments shall fulfill the fundamental principles. The question may arise, how far these instruments are able to ensure effective competition and its application synergy between instruments. This paper will seek to address the question of by which instruments of the Electricity Directive does the EU ensure competition in the electricity sector, in order to analyse whether all the instruments are sufficient to ensure effective competition this paper also will discuss the benefits and deficits of those instruments. In the first part of this paper general information about the essential idea behind Electricity Directive, the main instruments with their benefits and deficits will be discussed in the following parts respectively. The conclusion part answers the question whether all the instruments are sufficient to ensure effective competition or not.*

**Keywords:** *Electricity Directive, Internal Energy Market.*

## **Abstrak**

Untuk mencapai persaingan yang efektif diperlukan beberapa instrumen yang diharapkan dapat memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan ini. Electricity Directive menyediakan sistem baru dan beberapa pembaruan sistem yang ada. Penerapan instrumen tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip dasar. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah seberapa jauh instrumen ini mampu memastikan persaingan yang efektif dan sinergitas penerapan antar instrumen. Makalah ini akan berupaya menjawab pertanyaan tentang instrumen mana dari Electricity Directive yang dilakukan Uni Eropa untuk memastikan persaingan di sektor listrik, untuk menganalisis apakah semua instrumen tersebut memadai guna memastikan persaingan yang efektif, makalah ini juga akan membahas kelebihan dan kekurangan dari instrumen tersebut. Pada bagian pertama dari makalah ini, akan membahas informasi umum tentang latar belakang utama dari Electricity Directive, instrumen utama dengan kelebihan dan kekurangannya akan dibahas masing-masing di bagian selanjutnya. Bagian kesimpulan menjawab pertanyaan apakah semua instrumen memadai untuk memastikan persaingan yang efektif atau tidak

**Kata Kunci:** Arahan Kelistrikan, Pasar Energi Internal.

---

<sup>1</sup> Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC; OJ L 211, 14.8.2009

## A. Pendahuluan

*Electricity Directive* ini berusaha untuk lebih meliberalisasi pasar listrik internal, meningkatkan daya saing dan melindungi konsumen. *Electricity Directive* memperkenalkan pemisahan struktural antara sistem transmisi di satu sisi dan kegiatan produksi dan / atau pasokan di sisi lain dengan derajat yang berbeda yang disebut *unbundling*. Tujuan utama pemisahan kegiatan jaringan dan komersial di sektor energi ini adalah untuk memastikan akses pihak ketiga yang adil dan menghindari investasi strategis. Tujuan yang terakhir diharapkan mengarah pada peningkatan kemampuan *Transmission System Operator* (TSO) yang memiliki dan mengoperasikan sistem transmisi untuk memperluas jaringan mereka dengan cara yang meningkatkan akses bagi para pelaku pasar baru.<sup>2</sup> Tujuan-tujuan di atas menunjukkan bahwa arahan listrik telah diadopsi untuk merangsang investasi dalam membangun infrastruktur pasar energi yang stabil dan efektif. Selain dapat menghambat integrasi pasar listrik dan keamanan pasokan, kurangnya sarana penunjang dalam pasar energi juga akan berdampak pada pasar nasional di mana tidak ada pesaing dari negara anggota lain dan akhirnya pasar listrik itu sendiri tidak akan berfungsi dengan baik, apalagi bisa dibawa untuk menanggung pasar nasional dengan impor.<sup>3</sup> Komisi menyatakan bahwa kepemilikan yang tidak mengikat adalah alat yang paling efektif untuk mempromosikan keamanan pasokan dengan memastikan investasi yang diperlukan untuk membangun infrastruktur terutama yang berkaitan dengan interkoneksi dengan cara yang tidak diskriminatif karena TSO tidak akan memiliki insentif untuk mencegah investasi untuk kepentingan suatu usaha terafiliasi yang telah memiliki akses ke kapasitas sistem yang ada, akses yang adil ke jaringan untuk pendatang baru dan manfaat yang bersamaan untuk perdagangan antar negara Anggota dan integrasi pasar.<sup>4</sup>

Proyek-proyek infrastruktur pasar energi membutuhkan investasi besar khususnya untuk interkonektor yang akan dibangun di bawah laut ke beberapa pasar yang belum saling terhubung. Interkonektor tambahan memiliki peran penting untuk menyelesaikan

---

<sup>2</sup> See Recitals 9 of the Electricity Directive “Without effective separation of networks from activities of generation and supply (effective unbundling), there is an inherent risk of discrimination not only in the operation of the network but also in the incentives for vertically integrated undertakings to invest adequately in their networks...**in order to create incentives for the necessary investments and guarantee the access of new market entrants** under a transparent and efficient regulatory regime.”

<sup>3</sup> Johnston, Angus, Guy Block, *EU Energy Law*, Oxford University Press, 2012, p. 24.

<sup>4</sup> Recitals 8 of the Gas Directive

pasar listrik internal, memastikan persaingan yang efektif dan menjangkau semua konsumen Uni Eropa. Namun demikian, menambah interkonektor baru adalah investasi yang berisiko karena kenyataan bahwa investor tidak akan mendapatkan pengembalian dalam waktu tertentu. Ketidakpastian ini dapat menghambat investasi pada pembangunan infrastruktur baru pada akhirnya, untuk menangani masalah ini paket energi ketiga telah memberikan pengecualian untuk proyek-proyek interkonektor besar baru di mana investor dapat memperoleh pembebasan sementara dari aturan akses pihak ketiga dan regulasi tarif.<sup>5</sup> Dengan membebaskan TPA dan regulasi tarif, proyek dapat ditanggung oleh kontrak kapasitas jangka panjang, yang dapat dinegosiasikan dengan investor dengan pengirim tanpa campur tangan regulasi. Terkadang investor ingin memesan sebagian dari kapasitasnya untuk penggunaan mereka sendiri<sup>6</sup>.

Elemen baru lain yang penting adalah standar tinggi dari kewajiban layanan publik dan perlindungan pelanggan. Ketentuan ini bertujuan untuk memungkinkan pelanggan untuk beralih pemasok dengan cepat,<sup>7</sup> Memberikan standar tinggi layanan publik dan perlindungan konsumen dapat diartikan untuk memastikan bahwa konsumen akan mendapatkan pasokan listrik yang baik (bersih) dari pemasok dengan memegang prinsip keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pemasok. Singkatnya, perlindungan konsumen harus ditempatkan sebagai alasan prioritas untuk membangun infrastruktur baru alih-alih meningkatkan persaingan. Menghadapi banyak pilihan bagi konsumen tidak menjamin kompatibel dengan kepentingan konsumen dan dapat mengakibatkan kecenderungan untuk memasok listrik ke pasar dengan kepadatan tinggi..

## **B. Pembahasan**

Guna meningkatkan pembentukan pasar internal listrik, *Electricity Directive* sebagai bagian dari paket energi ketiga (*Third Energy Package*) memperkenalkan tidak hanya persyaratan baru dan signifikan kepada perusahaan transmisi serta kewenangan tambahan untuk lembaga pembentuk peraturan di tingkat nasional, akan tetapi terdapat mekanisme yang baru dalam pengambilan keputusan untuk mengadopsi ketentuan umum yang selaras dan harmonis dengan lembaga baru, sehingga penyesuaian tidak hanya dilakukan dengan Uni Eropa dan negara anggota yang lain akan tetapi dengan

---

<sup>5</sup> Article 17 Electricity Regulation

<sup>6</sup> Johnston, Angus, Guy Block, *op.cit.*, p.29.

<sup>7</sup> *Ibid.*

lembaga agensi yang baru.<sup>8</sup> Dalam Paket Energi Kedua, Regulation 2003/54/EC telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan pasar internal listrik semacam itu.<sup>9</sup> Namun demikian, saat ini terdapat hambatan untuk penjualan listrik dengan persyaratan yang sama dan tanpa diskriminasi atau kerugian di Komunitas. Secara khusus, akses jaringan non-diskriminatif dan tingkat pengawasan regulasi yang sama efektifnya di masing-masing negara anggota belum ada,<sup>10</sup> di mana faktor-faktor ini dapat menghambat terciptanya pergerakan barang yang bebas dan pergerakan tempat usaha yang bebas. Ada tiga jenis masalah yang muncul terkait akses ke jaringan di bawah Petunjuk 2003/54 / EC.

Pertama, operator sistem transmisi dapat memperlakukan perusahaan afiliasinya dengan lebih baik daripada pihak ketiga yang bersaing. Bahkan, perusahaan yang terintegrasi dapat menggunakan aset jaringan untuk membuat entri lebih sulit bagi pesaing. Kedua, di bawah aturan *unbundling* saat ini, akses non-diskriminatif terhadap informasi tidak dapat dijamin karena tidak ada cara yang efektif untuk mencegah operator sistem transmisi merilis informasi yang “sensitif” pasar ke cabang pembangkit atau pasokan perusahaan terintegrasi. Ketiga, insentif investasi dalam perusahaan terintegrasi menjadi terdistorsi.<sup>11</sup>

Masalah-masalah tersebut telah menunjukkan bahwa masih ada diskriminasi di pasar listrik, khususnya, akses ke jaringan. Ketentuan yang tidak mengikat menurut *Directive* 2003/54 tidak memfasilitasi kekurangan dan kemungkinan penting untuk meningkatkan berfungsinya pasar untuk memastikan tingkat permainan yang adil di tingkat produsen dan untuk mengurangi risiko dominasi pasar dan perilaku predator, memastikan transmisi yang tidak diskriminatif, dan tarif distribusi, melalui akses ke jaringan. Selain itu, hal ini berdampak pada tidak akan tercapainya tujuan pasar energi internal dalam memberikan pilihan nyata bagi semua konsumen Uni Eropa, baik mereka warga negara atau pelaku bisnis, peluang bisnis baru dan perdagangan lintas batas, yang ada akhirnya juga berdampak pada pencapaian efisiensi, harga kompetitif, dan standar

---

<sup>8</sup> Cabau, E. *Unbundling of TSO's in Jones, C. EU Energy Law: Volume I-the Internal Energy Market-the Third Liberalisation Package*, Claeys & Casteels, 2010, hal.1

<sup>9</sup> Recitals 2 Directive 2009/72/EC

<sup>10</sup> Recitals 4 Directive 2009/72/EC

<sup>11</sup> Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the internal market in electricity (presented by the Commission), Brussels, 19 September 2007, COM(2007), final, 2007/0195 (COD),4

layanan yang lebih tinggi, dan kontribusi pada keamanan pasokan yang keberlanjutan.<sup>12</sup> Komisi Uni Eropa telah mengusulkan langkah-langkah lebih lanjut, seperti, pemisahan yang efektif antara kegiatan pasokan dan produksi dari operator jaringan, harmonisasi kewenangan lebih lanjut dan peningkatan independensi regulator energi nasional, pembentukan mekanisme independen untuk kerja sama di antara regulator nasional; transparansi yang lebih besar dalam operasi pasar energi; penciptaan mekanisme bagi operator sistem transmisi untuk meningkatkan koordinasi operasi jaringan dan keamanan jaringan, operasi lintas batas dan jaringan.<sup>13</sup> Secara positif, melalui cara-cara itu pengembangan tiga paket legislatif energi dapat dilihat sebagai indikasi kuat untuk meningkatkan spesifikasi langkah-langkah, tanggung jawab, institusi, dan aturan terperinci tingkat Uni Eropa.<sup>14</sup> Dasar lain dari arahan ini adalah sebagai tanggapan terhadap persyaratan bagi Negara Anggota untuk menunjuk satu atau lebih badan yang kompeten dengan fungsi otoritas pengatur, yang harus "sepenuhnya independen dari kepentingan industri (listrik dan gas)". Persyaratan independensi yang terakhir ini didasarkan pada kebutuhan untuk memastikan netralitas pengambilan keputusan. Dengan demikian, pihak berwenang yang ditunjuk dilarang memiliki hubungan dengan, atau otoritas pengambilan keputusan atas, kepentingan industri energi, seperti misalnya produsen listrik, kecuali dalam menjalankan fungsi pengaturan. Kemandirian politik dan kemandirian dari bagian lain dari hierarki pemerintah, di sisi lain, tidak diperlukan oleh paket energi kedua. Lebih lanjut, arahan hanya mensyaratkan *National Regulatory Authorities* (NRA) untuk melakukan serangkaian fungsi minimum yang utama terkait dengan masalah terkait akses jaringan dan tarif.<sup>15</sup> Di beberapa Negara Anggota, pihak berwenang adalah badan mapan dengan kewenangan dan sumber daya yang substansial, sehingga memungkinkan mereka untuk memastikan regulasi pasar secara tepat. Di Negara-negara Anggota lainnya, otoritas pengawas baru saja dibentuk dan kewenangan mereka lebih lemah atau tersebar di berbagai badan. Tinjauan negara secara komprehensif dilakukan oleh Komisi Uni Eropa telah menunjukkan kurangnya keseragaman dan dalam banyak kasus kelemahan otoritas pengatur. Pengalaman

---

<sup>12</sup> Recitals 1 Directive 2009/72/EC

<sup>13</sup> Proposal for a Directive of The European Parliament and The Council amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the internal market in electricity

<sup>14</sup> Johnston AC, and Block Guy, *EU Energy Law*, Oxford: Oxford University Press, 2012, hal.6.

<sup>15</sup> Delvaux Bram, Hunt Michael, Talus Kim (eds). Volume 3., *EU energy law and policy issues*. Cambridge: Intersentia, 2012, hal.21.

Negara-negara Anggota yang pasarnya telah terbuka selama beberapa tahun, dan sektor utilitas lain yang terbuka untuk kompetisi, jelas menunjukkan bahwa regulator yang kuat diperlukan untuk pasar yang berfungsi dengan baik, khususnya sehubungan dengan penggunaan infrastruktur jaringan. Menurut situasi ini, perlu untuk mengembangkan proposal legislatif yang menyediakan harmonisasi kekuasaan lebih lanjut dan memperkuat independensi regulator energi nasional. Seharusnya dimungkinkan bagi otoritas pengatur nasional untuk mencakup sektor listrik dan gas.<sup>16</sup>

## **B.1 Instrumen dalam *Electricity Directive***

Pada bagian ini, akan dijelaskan landasan utama dari *Electricity Directive* dengan kelebihan dan kekurangannya. Ada tiga alat utama dalam *Electricity Directive*, yaitu, *Third Party Acces* (Akses Pihak Ketiga), tarif akses (alat ini akan dijelaskan melalui otoritas regulasi di tingkat nasional, yaitu *National Regulatory Authority*), dan *Unbundling*.

### **B.1.1. *Unbundling***

*Electricity Directive* mengatur mengenai pemisahan struktural antara transmisi dan kegiatan lainnya (*unbundling*). Di bawah Instruksi ini, pemisahan dapat dicapai dalam salah satu dari tiga cara berikut; *ownership unbundling*, *Independent System Operator* (ISO) sebagai derogasi terhadap *ownership unbundling*, dan *Independent Transmission Operator* (ITO) di mana operator memiliki aset dan milik perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, dengan aturan khusus untuk menjamin independensinya. Meskipun model-model ini menyediakan pemisahan struktural yang berbeda dalam operasi jaringan dari kegiatan produksi dan pasokan, masing-masing diharapkan efektif dalam menghilangkan konflik kepentingan antara produsen, pemasok dan operator sistem transmisi.<sup>17</sup>

Berkenaan dengan tujuan paket energi ketiga seperti yang telah disebutkan sebelumnya dan tanpa mengurangi model-model lain, hanya kepemilikan penuh yang

---

<sup>16</sup> Recitals 33 Directive 2009/72/EC

<sup>17</sup> Interpretative Note on Directive 2009/72/EC, hal.4.

tidak mengikat yang akan dibahas dalam bagian ini. *Ownership Unbundling* diatur dalam Pasal 9 (1) *Electricity Directive*

“Member States shall ensure that...:

- (a) *each undertaking which owns a transmission system act as a transmission system operator;*
- (b) *the same person or persons are entitled neither;*
  - (i) *directly or indirectly to exercise control over an undertaking performing any of the functions of generation or supply, and directly or indirectly to exercise control or exercise any right over a transmission system operator or over a transmission system; nor*
  - (ii) *directly or indirectly to exercise control over a transmission system operator or over a transmission system, and directly or indirectly to exercise control or exercise an right over an undertaking performing any of the functions of generation or supply.*<sup>18</sup>

Menurut Pasal 9 (1) setiap perusahaan yang memiliki sistem transmisi harus bertindak sebagai operator sistem transmisi. Ini berarti bahwa kepatuhan terhadap unbundling kepemilikan menyiratkan bahwa usaha yang sama yang merupakan pemilik sistem transmisi juga bertindak sebagai operator sistem transmisi. Pasal 9 (1) (b) (i) *Electricity Directive*, orang yang sama tidak berhak untuk melakukan kontrol atas suatu usaha yang melakukan salah satu fungsi produksi atau pasokan, dan untuk melakukan kontrol atau menggunakan hak atas TSO atau transmisi. sistem. Paragraf 1 (b) (ii) memberikan aturan yang sama tetapi mencakup situasi alternatif seseorang yang melakukan kontrol atas TSO, dan melakukan kontrol atau hak atas suatu perusahaan yang melakukan salah satu fungsi produksi atau pasokan.<sup>19</sup> Oleh karena itu, Paragraf 1 (b) memberikan definisi utama tentang *ownership unbundling*. Dengan kata lain, suatu perusahaan dapat mengendalikan perusahaan yang melakukan salah satu fungsi produksi atau pasokan, atau operator sistem transmisi, tetapi tidak keduanya. Itu juga tidak dapat memiliki hak dalam pemasok ketika mengontrol TSO, atau hak dalam TSO ketika mengontrol pemasok. *Ownership unbundling* ditetapkan oleh *Electricity Directive* sebagai model standar, dapat dilihat di mana pada tanggal 3 September 2009, sistem transmisi milik Negara Anggota yang melakukan pengintegrasian secara vertikal dapat memutuskan untuk tidak menerapkan paragraf 1.<sup>20</sup> Pasal 9 (8) memberikan opsi untuk melakukan upaya dalam memutuskan model mana yang akan diterapkan, sejauh

---

<sup>18</sup> Article 9 Directive 2009/72/EC.

<sup>19</sup> Interpretative Note on Directive 2009/72/EC, p.8

<sup>20</sup> Article 9(8) Directive 2009/72/EC

usaha memenuhi ketentuan ini, jika tidak, Negara Anggota harus menerapkan paragraf 1. Pemisahan dengan cara ini akan membuat operator benar-benar independen, oleh karena itu, ia akan menghindari konflik kepentingan antara produsen, pemasok di satu sisi dan operator sistem transmisi di sisi lain dan mengurangi ruang lingkup untuk diskriminasi terhadap saingan yang tidak terintegrasi, cukup yakin, ketika ada konflik kepentingan atau diskriminasi, itu akan membawa dampak negatif bagi konsumen pada akhirnya, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Misalnya, jika operator jaringan memberikan tarif yang berbeda untuk menggunakan akses untuk pembangkit listrik atau pemasok tertentu, situasi ini akan membawa perbedaan harga terlalu tinggi, di mana beberapa konsumen membayar dengan harga yang tepat, sementara yang lain harus membayar dengan harga yang lebih tinggi. Seperti kita ketahui, persaingan yang efektif harus membawa manfaat bagi konsumen, seperti, harga rendah dan produk berkualitas tinggi, berbagai pilihan barang dan jasa, dan inovasi, di mana semua hal ini harus dipenuhi oleh suatu kompetisi.

Persyaratan untuk pemisahan struktur antara transmisi dan kegiatan lainnya, kepemilikan yang tidak dapat diblokir khususnya, memerlukan restrukturisasi ekstrem dalam banyak aspek untuk memisahkan transmisi dengan kegiatan lain, selain itu, diperlukan biaya tinggi untuk membangun sistem baru yang mengendalikan seluruh jaringan. Sementara usaha harus direstrukturisasi cincin banyak aspek, produksi dan permintaan listrik masih berjalan, situasi ini mungkin mengurangi kualitas layanan dan produk untuk waktu tertentu.

### **B.1.2. *National Regulatory Authority***

Sebagaimana disebutkan sebelumnya untuk menjelaskan tarif akses, makalah ini akan menjelaskan otoritas pengaturan nasional serta kekuasaan dan tugas mereka. Otoritas Pengatur Nasional yang diatur dalam Pasal 35. Electricity Directive mensyaratkan setiap Negara Anggota untuk menunjuk satu otoritas pengatur nasional tunggal di tingkat nasional.<sup>21</sup>

*“Member States shall guarantee the independence of the regulatory authority and shall ensure that it exercises its powers impartially and transparently.*

---

<sup>21</sup> Article 35 (1) Directive 2009/72/EC



*For this purpose, Member States shall ensure that, when carrying out the regulatory tasks conferred upon it by this Directive and related legislation, the regulatory authority:*

- (a) is legally distinct and functionally independent from any other public or private entity;*
- (b) ensures that its staff and the persons responsible for its management:
  - (i) act independently from any market interest; and*
  - (ii) do not seek or take direct instructions from any government or other public or private entity when carrying out the regulatory tasks. That requirement is without prejudice to close cooperation, as appropriate, with other relevant national authorities or to general policy guidelines issued by the government not related to the regulatory powers and duties under Article 37.*<sup>22</sup>*

Menurut Pasal 35 (1) dan (4), independensi, tidak memihak, dan transparan didasarkan pada kebutuhan untuk memastikan netralitas pengambilan keputusan. Dengan demikian, otoritas pengaturan yang ditunjuk dilarang memiliki hubungan dengan, atau otoritas pengambilan keputusan atas, kepentingan energi, seperti misalnya produsen listrik, kecuali dalam menjalankan fungsi pengaturan.<sup>23</sup> Kemandirian dalam undang-undang baru ini tidak hanya menyangkut industri listrik dan gas tetapi juga badan publik lainnya (termasuk pemerintah nasional, lokal atau regional, kota atau organisasi atau struktur politik) atau badan swasta.<sup>24</sup> Selain itu, NRA harus dibuat sebagai badan hukum yang terpisah dan berbeda dari Kementerian atau badan pemerintah lainnya.<sup>25</sup> Untuk memastikan NRA, Negara-negara Anggota harus menjamin bahwa NRA menggunakan kekuatannya dan melaksanakan tugasnya secara tidak memihak. Ketidakberpihakan bertujuan untuk menjamin bahwa NRA bertindak dan mengambil keputusan secara netral, berdasarkan pada kriteria dan metodologi objektif. Dalam pandangan layanan Komisi, persyaratan ini berarti bahwa Negara-negara Anggota harus memberikan sanksi perdata, administratif dan / atau pidana jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tentang ketidakberpihakan.<sup>26</sup> NRA juga harus melaksanakan tugasnya secara transparan, keputusan NRA harus memfasilitasi semua pemangku kepentingan, di mana, setiap proses pengambilan keputusan harus dipublikasikan. NRA memiliki tugas dan wewenang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37, Daftar dalam Pasal 37 (1) *Electricity Directive* dan Pasal 41 (1) *Petunjuk Gas* berisi sejumlah tugas inti NRA.

---

<sup>22</sup> Article 35 (4) Directive 2009/72/EC.

<sup>23</sup> Delvaux Bram, Hunt Michael, Talus Kim (eds). Volume 3., *EU energy law and policy issues*. Cambridge: Intersentia, 2012, hal.21.

<sup>24</sup> Interpretative Note Directive 2009/72/EC. hal.6.

<sup>25</sup> Ibid.6.

<sup>26</sup> Ibid.5.

Tugas inti ini meliputi; memperbaiki atau menyetujui, sesuai dengan kriteria transparan, tarif transmisi atau distribusi atau metodologi mereka; memastikan bahwa tidak ada subsidi silang antara transmisi, distribusi, gas alam cair, penyimpanan, dan kegiatan pasokan; memastikan kepatuhan operator sistem transmisi dan distribusi, pemilik sistem (jika relevan) dan usaha listrik atau gas dengan kewajiban mereka berdasarkan Arahan dan undang-undang Uni Eropa lainnya yang relevan, termasuk mengenai masalah lintas batas yang membantu memastikan, bersama dengan otoritas terkait lainnya, bahwa langkah-langkah perlindungan konsumen, rekomendasi penerbitan, setidaknya setiap tahun, sehubungan dengan kepatuhan harga pasokan dengan Pasal 3; memastikan akses ke data konsumsi pelanggan.<sup>27</sup> Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Peraturan (EC) 714/2009, NRA akan mempertimbangkan beberapa hal untuk memperbaiki menyetujui tarif akses, seperti, tarif harus transparan dan tidak diskriminatif, tarif tidak boleh terkait jarak, dan tarif harus tercermin biaya aktual.

Berkenaan dengan tugas dan wewenang NRA, dapat dikatakan bahwa NRA memiliki wewenang untuk mempertahankan tarif akses yang adil tanpa diskriminasi dan campur tangan pemerintah, juga mengurangi kesenjangan peraturan di Negara-negara Anggota. NRA dengan tugas dan wewenangnya diharapkan untuk mencapai harmonisasi peraturan di tingkat nasional, namun masing-masing Negara Anggota memiliki masalah yang berbeda dengan kerumitan mengenai penerapan regulasi tarif, oleh karena itu, dalam beberapa masalah NRA mungkin tidak sesuai. Selain itu, untuk mengatur jaringan listrik, kebutuhan banyak karyawan dan biaya tinggi, misalnya di *Bundesnetzagentur* memiliki sekitar 1500 operator jaringan untuk pasar listrik.

Ada beberapa dampak sebagai akibat dari independensi NRA dan peningkatan kompetensi mereka, baik tumpang tindih vertikal atau tumpang tindih horizontal. Tumpang tindih vertikal dapat terjadi dalam tiga situasi yaitu antara Komisi dan NRA, Komisi dan NCA dan ACER dan NRA,<sup>28</sup> sedangkan tumpang tindih horizontal dapat terjadi dalam dua situasi yaitu Antara ACER dan Komisi dan antara NRA dan NCA.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid.6.

<sup>28</sup> Johnston AC, and Block Guy, *EU Energy Law*, Oxford: Oxford University Press, 2012,hal.198

<sup>29</sup> Ibid.202

### **B.1.3. *Third Party Access***

Ketentuan mengenai TPA diatur dalam Pasal 32 *Electricity Directive*, di mana Negara Anggota harus memastikan implementasi sistem akses pihak ketiga ke sistem transmisi dan distribusi berdasarkan tarif yang dipublikasikan, berlaku untuk semua pelanggan yang memenuhi syarat dan diterapkan secara obyektif dan tanpa diskriminasi antara pengguna sistem. Ada dua pengecualian dalam penerapan TPA, Pertama, operator sistem transmisi atau distribusi dapat menolak akses di mana ia tidak memiliki kapasitas yang diperlukan. Alasan yang benar-benar dibuktikan harus diberikan untuk penolakan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 3, dan didasarkan pada kriteria objektif dan kriteria teknis dan ekonomi yang dibenarkan.<sup>30</sup> Kedua, interkoneksi arus searah baru dapat atas permintaan dibebaskan untuk jangka waktu terbatas dari ketentuan Pasal 32 *Electricity Directive* untuk infrastruktur baru.

### **C. Penutup**

Sebelum menilai apakah instrumen ini cukup memadai untuk memastikan persaingan yang efektif, ada tiga prinsip yang harus dipenuhi oleh langkah-langkah ini. Pertama, adalah kesesuaian, apakah ukuran itu adalah cara yang cocok untuk mencapai tujuan, kedua, adalah keharusan, apakah ukuran itu adalah alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Ketiga, adalah proporsionalitas *stricto sensu*, di mana, ukurannya harus proporsional. Selama transisi ke pemisahan antara transmisi dengan kegiatan lain, berpotensi, ada ketidakstabilan di pasar, penurunan kualitas barang dan memberikan harga tinggi kepada konsumen. Untuk mencegah dampak yang mungkin terjadi, kepemilikan yang tidak mengikat akan lebih cocok ketika semua infrastruktur sudah tersedia, lebih jauh lagi, selama transmisi, kepemilikan yang tidak mengikat tidak cukup untuk memastikan persaingan yang efektif. Memiliki kontrol penuh pada semua operasi jaringan dan aset adalah saling tergantung, di samping itu, upaya independen tidak menjamin penghapusan non-diskriminatif segera, manajemen yang buruk atau pribadi harus dianggap sebagai faktor negatif.

---

<sup>30</sup> Article 32(1) Directive 2009/72/EC

Electricity Directive memberikan otoritas yang sangat luas kepada NRA, ini dapat mengarah pada kebijakan yang tidak konsisten dengan otoritas lain, khususnya otoritas persaingan di tingkat nasional. Namun penerapan undang-undang persaingan sebagai sarana untuk menerapkan peraturan khusus sektor dapat menimbulkan keraguan serius dari yurisdiksi serta perspektif ekonomi.<sup>31</sup> Akhirnya, akan membawa ketidakjelasan kebijakan mana yang harus digunakan sebagai referensi, karenanya, ukuran tersebut harus proporsional dengan ukuran lain, kebijakan yang tumpang tindih antara pihak berwenang akan memiliki dampak signifikan pada persaingan, regulasi harmonisasi tidak berarti membuat regulasi homogenitas. Sebagai kunci utama, tanpa banyak perubahan signifikan dan mendasar mengenai TPA, langkah ini telah terbukti untuk memastikan persaingan yang efektif.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Bjornebye, Henrik, *Investing in EU energy security: exploring the regulatory approach to tomorrow's electricity, production*, Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2010

Cabau, E. Unbundling of TSO's in Jones, C. *EU Energy Law: Volume I-the Internal Energy Market-the Third Liberalisation Package*, Claeys & Casteels, 2010.

Delvaux Bram, Hunt Michael, Talus Kim (eds). Volume 3., *EU energy law and policy issues*. Cambridge: Intersentia, 2012.

Johnston, Angus, Guy Block, *EU Energy Law*, Oxford University Press, 2012.

### **Peraturan**

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union; OJ C 83, 30/3/2010

Directive 96/92/EC of the European Parliament and the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity; OJ L 027, 30/1/1997

Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC; OJ L 211/55, 14/8/2009

---

<sup>31</sup> Johnston AC, and Block Guy, *EU Energy Law*, Oxford: Oxford University Press, 2012, p.204

Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC; OJ L 176, 15.7.2003

European Commission Staff Working Paper, Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the internal market in electricity (presented by the Commission), Brussels, 19 September 2007, COM(2007), final, 2007/0195 (COD),4.